

Deskriptif Interpretasi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terkait Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Sebagai Adaptif Pengelolaan Keuangan Daerah

Ubbadullah¹, Tantina Haryati²

*Email: aadaad874@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Abstract. *Financial Management Pattern of Regional Public Service Agency has so many benefits which provide flexibility to manage the financial. Because of this method, every regional technical implementing unit can increase their service maximally. Prospective accountants must be able to face this method by mastering internship and being able to interpret this method. Through this research, the researcher intends to explore the interpretation skills of the Accounting. The method used is qualitative with data collection techniques in the form of literature reviews such as journals and textbooks and also interviews with a total of 10 informants who are Accounting students at some University. The data collected is then analyzed using the Spradley model. Research shows that Accounting students have a good understanding of this method but do not yet have the ability to deal with it as evidenced by not being able to interpret Financial Management Pattern of Regional Public Service Agency. Mostly, every students just thinks about what the definition of Regional Public Service Agency. But, the researcher get some facts about the students who can interpretation this method. They join a internship to get more knowledge to become an accountant. Because in the institutions don't teach about this material. So, in this research is served as a bridge for students and institutions to evaluate existing understandings and activities so that they can improve them in order to compete become a professional accountant.*

Keywords: *financial management pattern, regional public service agency, data interpretation, professional accountant*

Abstrak. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah memiliki begitu banyak manfaat yang memberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan. Karena metode ini, setiap unit pelaksana teknis regional dapat meningkatkan layanan mereka secara maksimal. Calon akuntan harus mampu menghadapi metode ini dengan menguasai magang dan mampu menginterpretasikan metode ini. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengeksplorasi keterampilan interpretasi Akuntansi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka seperti jurnal dan buku teks dan juga wawancara dengan total 10 informan yang merupakan mahasiswa Akuntansi di beberapa Universitas. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model Spradley. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Akuntansi memiliki pemahaman yang baik tentang metode ini namun belum memiliki kemampuan untuk menghadapinya yang dibuktikan dengan tidak mampu menginterpretasikan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sebagian besar, setiap mahasiswa hanya memikirkan apa definisi Badan Layanan Umum Daerah. Tapi, peneliti mendapatkan beberapa fakta tentang siswa yang dapat menafsirkan metode ini. Mereka mengikuti magang untuk mendapatkan lebih banyak ilmu untuk menjadi seorang akuntan. Karena di lembaga-lembaga tidak mengajarkan tentang materi ini. Sehingga, dalam penelitian ini dijadikan jembatan bagi mahasiswa dan institusi untuk mengevaluasi pemahaman dan kegiatan yang ada sehingga dapat meningkatkannya agar dapat bersaing menjadi seorang akuntan yang profesional.

Kata Kunci: pola pengelolaan keuangan, badan layanan umum daerah, interpretasi data, akuntan profesional

Pendahuluan

Sebuah fungsi organisasi yang tersistem, dapat dipercaya dan asli dalam upaya klasifikasi, catatan, proses, analisis, serta interpretasi setiap transaksi dan kejadian serta karakter keuangan dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai tanggung jawab atas kinerja organisasi, menurut Paul Gradi (2017). Telah menjadi rahasia umum bahwa akuntansi menjadi solusi terbaik dalam upaya manajemen keuangan. Tentunya pemahaman akuntansi tersebut dapat didapati dengan memahami pemahaman pendukungnya atau secara sederhananya memahami perbedaan antara proses masuk dan keluarnya kas.

Berkaitan dengan akuntansi berhubungan pula dengan pola pengelolaan keuangan, dimana dalam hal ini pola pengelolaan penulis fokuskan pada pengelolaan publik. Pola pengelolaan keuangan secara publik ini terbagi menjadi tiga (3) yaitu public goods, quasi public goods, dan private goods. Pemahaman tersebut menentukan bagaimana nantinya seorang akuntan melakukan proses manajemen keuangan tersebut, dimana hal tersebut haruslah disesuaikan dengan pola pengelolaan keuangan publik tersebut. Dan dengan hal tersebutlah hasil dari seorang akuntan dapat dikatakan sesuai ataupun tidak. Pengerjaan tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan tidaklah mungkin didapati hasil yang maksimal.

Menghadapi begitu beragamnya konsep pengelolaan keuangan yang telah disebutkan sebelumnya. Pola pengelolaan secara quasi public goods yang menjadi istilah baru bagi mahasiswa akuntansi. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mendapat jawaban akan pola quasi public goods yang mana dapat berguna di era ini. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa berbagai unit pelaksana teknis mengalami kesulitan dalam proses pengelolaan keuangan secara public goods dan private goods. Public goods hanya berfokus pada proses pelayanan sedangkan untuk private goods lebih terfokus pada profit. Kedua pola pelayanan tersebut tentunya tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. Hanya terfokus pada layanan tanpa adanya profit akan mengganggu proses operasional secara internal bagi organisasi, sedangkan hanya terfokus pada profitpun akan berdampak pada minimnya kualitas pelayanan. Perlu adanya sebuah pola yang dapat menggabungkan kedua konsep pola pelayanan keuangan tersebut. Pola tersebut adalah quasi public goods, dimana pola tersebut menggabungkan kedua pola antara public dan private goods.

Pola quasi public goods mampu membantu unit pelaksana teknis dalam mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Pola quasi public goods adalah sebuah pola yang menghadirkan konsep Unit pelaksana teknis Daerah (BLUD). Sebuah konsep yang mampu memberikan fleksibilitas dalam upaya pengelolaan keuangan bagi unit pelaksana teknis dinas/daerah. BLUD mempunyai intisari dalam upaya peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Yang mana BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Konsep BLUD tersebut mampu menjadi jawaban bagi beberapa unit pelaksana teknis dinas/daerah atas permasalahan yang sering dialami. Dimana beberapa keluhan dari unit pelaksana teknis dinas/daerah adalah disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan ini disebabkan oleh kurang maksimalnya proses pengajuan anggaran, dimana setiap unit pelaksana terpadu dinas/daerah diharapkan mengajukan anggaran keuangan di awal periode operasional dari unit pelaksana teknis dinas/daerah. Hal tersebut sangatlah berdampak bilamana ada anggaran diluar perencanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional dari unit pelaksana teknis dinas/daerah. Sehingga akibat adanya momen yang tidak terduga akan berdampak pada proses pelayanan dari unit

pelaksana teknis dinas/daerah. Berdasarkan tinjau masalah tersebut, konsep BLUD dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.

Dewasa ini pemahaman terkait konsep BLUD masih menjadi hal yang baru dibuktikan dengan masih banyaknya unit pelaksana teknis dinas/daerah yang belum memahami konsep tersebut. Maka dari itu perlu adanya komunikasi terkait penanaman pemahaman konsep BLUD. Baik dalam hal komunikasi terhadap unit pelaksana teknis dinas/daerah ataupun kepada akuntan atau penyedia jasa konsultan terkait. Sikap sebagai seorang implementor inilah yang menjadi kunci utama bagi sebuah unit pelaksana teknis dinas/daerah agar mampu menjadi sebuah BLUD. Maka dari itu perlu adanya pemahaman lebih lanjut bagi para calon akuntan atau akuntan profesional untuk menjadi sebuah fasilitator dalam proses perubahan tersebut.

Dengan demikian peneliti menyusun artikel akademik ini demi memberikan pemahaman bagi unit pelaksana teknis dinas/daerah serta akuntan untuk dapat lebih mengenal bagaimana proses penerapan BLUD. Ditambah juga untuk menjawab pertanyaan peneliti, bagaimana tingkat interpretasi konsep BLUD bagi unit pelaksana teknis dinas/daerah dan akuntan.

Metode Pengabdian

Peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa tinjauan literatur (data sekunder) dan wawancara (data primer) dalam bentuk kuesioner kepada 10 mahasiswa akuntansi yang sedang mempelajari konsep BLUD saat mengikuti program MSIB Batch 2 dengan teknik pemilihan informan menggunakan metode praduga atau a priori sampling. Data kemudian dianalisis dengan model Spradley dengan tahapan berupa analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.

Hasil, Pembahasan dan Dampak

Analisis interpretasi persepsi mahasiswa akuntansi terkait BLUD dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tinjauan data dari beberapa mahasiswa akuntansi. Atas tinjauan literatur dan melaksanakan wawancara, didapat hasil sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pengelolaan Keuangan BLUD di Kampus

Pengetahuan secara mendasar ataupun awal menjadi tolak ukur bagaimana implementasi pemahaman pola pengelolaan keuangan BLUD. Kembali lagi pemahaman awal ini sangatlah penting bagi seorang mahasiswa akuntansi karena hal ini berhubungan secara langsung dengan tingkat literasi dari mahasiswa tersebut. Terlebih lagi mahasiswa akuntansi ini merupakan calon akuntan profesional yang kurang lebihnya harus memahami pola pengelolaan keuangan baik secara PSAK ataupun PSAP. Bagaimanapun bekal teori yang didapat di dalam kampus akan sangat berpengaruh dalam perkembangan karir dari para calon akuntan. Kembali lagi akan berbeda kualitas akuntan yang mempunyai pemahaman dasar yang lengkap dibandingkan dengan akuntan yang minim pemahaman.

Atas tinjauan informasi dari penulis melalui proses wawancara terhadap beberapa mahasiswa akuntansi, memang pada universitas tempat mereka menempuh program studi tidak didapatinya mata kuliah yang mempelajari program pengelolaan keuangan BLUD. Para responden dari penulis dengan serentak menjawab bahwasannya mereka tidak mendapatkan pemahaman dasar terkait BLUD di kampus mereka. Dengan beberapa fakta dan data yang didapat penulis dapat memberikan sebuah pernyataan dimana memang pemahaman dasar terkait pola pengelolaan BLUD memang tidak didapatkan di kampus. Sehingga masih banyak mahasiswa akuntansi yang belum mengenal istilah BLUD.

2. Pemahaman mahasiswa akuntansi atas BLUD

Mahasiswa mengakui bahwa mereka berusaha untuk menjadi pribadi yang melek, terutama pemahaman yang tidak mereka dapatkan di dunia kampus, yaitu yang berhubungan langsung dengan pekerjaan Akuntan. Merekapun juga berusaha untuk memperdalam pengetahuan akademik di bidang akuntansi. Atas beberapa upaya tersebut menyebabkan beberapa mahasiswa akuntansi yang menjadi responden penulis memiliki pemahaman terkait BLUD meskipun pemahaman tersebut tidak diajarkan di dalam kampus.

Selain kedua usaha yang dilakukan diuraikan di atas, calon Akuntan juga harus mampu menginterpretasi dan menganalisis pola pengelolaan keuangan dari BLUD. Interpretasi ini berguna bagi akuntan untuk membantu sebuah UPTD untuk membantu memberikan saran atas pengambilan keputusan terkait perubahan menjadi BLUD. Skill komunikasi juga perlu karena Akuntan dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan dan menerjemahkannya untuk pihak decision maker. Maka dari itu, pemahaman di luar kampus menjadi indikator penting dalam menunjang kualitas akuntan profesional kedepannya.

3. Interpretasi pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap BLUD

Pemahaman dan teori harus disertakan dengan proses interpretasi yang sesuai. Tingkat paham atau mampunya seorang akuntan tidak bisa diukur hanya dalam segi pemahaman teori. Melainkan perlu diikuti proses interpretasi teori atau pemahaman. Dengan inerpretasi ini seorang akuntan dapat memberikan saran pengelolaan keuangan atau dengan kata lain mampu memberikan pandangan terkait plus atau minus menggunakan BLUD. Sehingga pihak manajemen dari UPTD mampu menciptakan sebuah keputusan yang tepat.

Berdasarkan data dari responden penulis didapati beberapa fakta dimana dari mahasiswa akuntansi yang mengisi dapat dikatakan tingkat pemahaman mereka hanya sebatas teori atau gambaran atas penerapan BLUD. Akan tetapi didapati juga beberapa responden yang memiliki pemahaman dan interpretasi yang sesuai atau tepat. Ketika diberikan penelitian lebih lanjut lagi memang mahasiswa tersebut melakukan proses pembelajaran di luar kampus. Dengan mengikuti program magang, dimana program tersebut terfokus kepada proses pelaksanaan BLUD. Terfokus dalam proses Pra-BLUD hingga Pasca-BLUD. Ditambah lagi mahasiswa akuntansi tersebut berkesempatan secara langsung mendampingi klien dalam proses pengelolaan keuangan melalui sistem. Sehingga dengan mahasiswa tersebut memiliki pemahaman secara teori dan interpretasinya.

4. Manfaat Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Mengutip dari data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, dimana realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp 54,4 triliun, mendapatkan predikat tertinggi dari tahun sebelumnya. Yang mana jumlah tersebut mengalami peningkatan sejumlah 14 % dari realisasi tahun sebelumnya dan juga sebesar 25% dari yang ditargetkan 2018 yaitu sebesar Rp 43,3 triliun. Sedangkan data pendapatan dari BLU pada APBN tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp 47,88 triliun. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa antusias yang sangat tinggi dari UPTD yang akan menjadi BLUD. Antusias ini disebabkan oleh salah satunya adalah manfaat UPTD yang menerapkan PPK-BLUD, antara lain:

- a. Pendapatan, dalam hal ini pendapatan bagi BLUD dapat digunakan langsung
- b. Belanja, anggaran yang digunakan untuk budget belanja pun juga fleksible dengan ambang batas.
- c. Didapatinya pengelolaan kas, pemanfaatan idle cash, dan hasil untuk BLU

- d. Didapatinya pengelolaan piutang usaha,serta penghapusan piutang sampai batas tertentu
- e. Utang, dalam pengelolaan utang dapat dilakukan utang sesuai dengan jenjang,serta tanggung jawab pelunasan pada BLU
- f. Investasi, dengan menggunakan BLUD dapat diberikan izin menerima investasi dari investor
- g. Pengelolaan Barang,dalam hal ini dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris serta dapat dihapus BLU
- h. Remunerasi,terkait kebijakan ini dapat disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme
- i. Surplus/Defisit, selain itu ada fleksibel terkait surplus dimana dapat digunakan untuk tahun berikutnya,serta defisit dapat dimintakan dari APBN.
- j. Kepegawaian, pegawai dapat berasal dari PNS dan Profesional Non-PNS
- k. Organisasi dan nomenklatur, diserahkan kepada K/L & BLU yang bersangkutan sesuai dengan persetujuan Menpan & RB.

Dengan adanya BLUD ini dapat menjadikan solusi atas peningkatan pelayanan bukan meningkatkan keuntungan. Ditambah lagi masih banyak persepsi yang salah dikalangan masyarakat dimana banyak juga yang berpendapat bahwa PUSKESMAS harus memiliki rawat inap, serta pendapatan dengan nominal jumlah tertentu untuk dapat menjadi BLUD. Faktanya memang tidak seperti itu. Tujuan utama menjadikan PUSKESMAS menjadi BLUD adalah demi adanya keamanan dalam bekerja,serta kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat. Berdasarkan data diatas, BLUD sangatlah menguntungkan karena dengan menjadi BLUD begitu banyak kemudahan yang didapat terutama dalam hal fleksibilitas.

5. Kemampuan Mahasiswa Akuntansi dalam Menginterpretasi Pemahaman BLUD

Dalam memberikan pernyataan, penulis menjawab berdasarkan data yang didapat. Dimana dari 70 % informan tidak mampu menginterpretasi hal tersebut. Hal tersebut diberikan karena setiap pendapat dari responden didasarkan atas dasar definisi dari BLUD. Penyebab ketidakmampuan mahasiswa akuntansi dalam menginterpretasi pemahaman BLUD disebabkan oleh beberapa faktor. Para informan menyatakan bahwa ketidakmampuan mereka disebabkan karena faktor internal seperti tidak adanya hasrat untuk mempelajari lagi sedangkan penyebab eksternal berupa tidak didapatinya mata kuliah yang menerangkan terkait BLUD.

Hal ini semakin diperkuat oleh mahasiswa akuntansi yang tidak mengerti sama sekali terkait BLUD. Mereka kurang memahami bagaimana cara kerja dari pengelolaan keuangan dari BLUD. Mereka hanya terfokus pada pemahaman dasar yang mereka dapat dari internet. Dengan demikian mahasiswa akuntansi harus mengambil pengalaman sebanyaknya dari luar kampus yaitu mengikuti internship. Pemahaman dari kampus saja tidak cukup menunjang kualitas dari seorang akuntan profesional. Perlu adanya implementasi atas pemahaman baru yang belum diajarkan di dalam kampus, yaitu Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Belajar dari peraturan terkait demi mendapatkan gambaran atas proses pengajuan BLUD. Dan setelahnya belajar secara langsung bagaimana sebuah laporan keuangan dari BLUD. Menyesuaikan apa yang telah didapat di dalam kampus dengan pengalaman profesional di luar kampus.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Akuntansi kurang mampu menginterpretasikan pemahaman pola pengelolaan keuangan BLUD. Sangat

disayangkan pemahaman mahasiswa hanya sebatas mengetahui bukan hingga ke level menguasai. Dalam hal interpretasi dan analisis pun juga sangat kurang sehingga perlu reminder dan praktik lagi. Dengan demikian perlu adanya pendalaman pemahaman pada Permendagri No 79 tahun 2018 yaitu pedoman secara fundamental bagi mahasiswa untuk memahami lebih lanjut terkait BLUD. Ditambahkan dengan pengalaman dari luar yang mampu menunjang kualitas akuntan profesional.

Implikasi dititik beratkan kepada lembaga, dalam hal ini adalah pihak prodi, untuk memperbaiki proses pembelajaran agar mahasiswanya berkualitas dan siap menghadapi persaingan dunia akuntan profesional. Tidak setiap mahasiswa akuntansi mempunyai kesempatan untuk belajar di luar. Dengan demikian perlu adanya support dari kampus untuk memberikan pondasi yang kuat bagi para calon akuntan. Dengan melakukan penyesuaian kurikulum terkait perkembangan dunia akuntansi di luar. Sehingga mahasiswa akuntansi tetap dapat update dan paham terhadap hal hal yang bersifat baru.

Kembali lagi hasil dari penulis ini memang masih dikatakan kurang mendalam dan mendetail. Dengannya perlu adanya penelitian lanjutan untuk membahas topik yang sama ataupun serupa. Penelitian ini terbatas pada 10 informan saja. Yang terdiri dari beberapa universitas serta berbeda angkatan. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melebarkan scope informan agar data yang diperoleh lebih bervariasi dan lebih dalam.

Daftar Pustaka

- Ismail, N. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Leo, A. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Menteri Dalam Negeri. (2018, September 04). *BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH*. Jakarta, Indonesia.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Syncore. (2019, April 30). <https://blud.co.id/wp/blud-berikan-banyak-manfaat/>.
Diambil kembali dari <https://blud.co.id/>: https://blud.co.id